

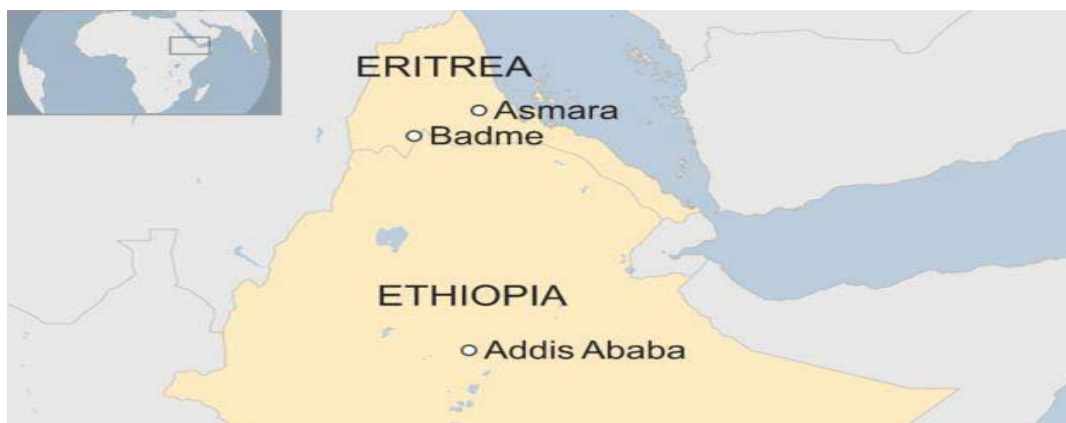
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ethiopia dan Eritrea merupakan dua negara bertetangga di wilayah Tanduk Afrika yang merupakan sub-region dari kawasan Afrika Timur. Selama dua dekade terakhir, kedua negara yang dulunya tergabung dalam Federasi Ethiopia-Eritrea tersebut tidak memiliki hubungan bilateral yang aktif satu sama lainnya dan cenderung menunjukkan hubungan yang fluktuatif dalam prosenya. Putusnya hubungan bilateral diantara kedua negara tersebut merupakan dampak dari Perang Eritrea-Ethiopia yang terjadi dua dekade sebelumnya (Plaut, 2017). Perang yang berlangsung dari tahun 1998 hingga 2000 diantara dua negara termiskin di Afrika tersebut berakar dari sengketa diantara kedua negara terhadap wilayah perbatasan khususnya terhadap wilayah Badme yang berada di perbatasan kedua negara.

Gambar 1.1 Letak Wilayah Badme di Perbatasan Eritrea dan Ethiopia



Sumber: BBC, 2018.

Badme merupakan sebuah kota kecil di perbatasan antara dua negara bertetangga di kawasan Tanduk Afrika di Afrika Timur yaitu Eritrea dan Ethiopia. Dibawah kekuasaan Ethiopia, wilayah Badme dan sekitarnya merupakan bagian dari wilayah administratif Tigray, sementara bagi Eritrea, wilayah Badme merupakan bagian dari wilayah administratif Gash-Barka. Meskipun disebut kota, menurut Marc Lacey (2002) penyebutan kota bagi wilayah tersebut cenderung dilebih-lebihkan sebagai bukti adanya pembangunan dan pengembangan di kawasan tersebut khususnya oleh pihak Ethiopia. Hingga hari ini kawasan tersebut masih di dominasi rumah-rumah sederhana dan berdebu yang berjauhan dengan jalan tanah sebagai penghubungnya (Araia, 2018). Penduduk yang tinggal di wilayah Badme dan sekitarnya sendiri, hanya terdiri dari beberapa ribu orang yang menggantungkan hidupnya dari bidang agrikultur dan peternakan. Meskipun wilayah tersebut cenderung tidak bernilai khususnya secara ekonomis, namun baik Eritrea maupun Ethiopia memandang penting Badme sebagai bagian dari kedaulatan mereka. Banyak pemimpin dan elit politik utama dari kedua negara paska kekuasaan rezim komunis Derg pada 1991 seperti Presiden Isaias Afwerki dari Eritrea dan Perdana Menteri Meles Zenawi dari Ethiopia merupakan keturunan suku Tigray yang mendiami kawasan tersebut (Mclure, 2007).

Beberapa upaya diplomatik sepanjang periode 1991-1997 sesungguhnya telah dilancarkan oleh kedua negara namun cenderung berakhir buntu. Kegagalan upaya diplomatik tersebut menyebabkan pada 1998, pemerintah Eritrea dibawah Presiden Isaias Afwerki dengan menjadikan sengketa di perbatasan tersebut khususnya wilayah Badme sebagai suatu *casus belli*, memulai serangan berskala penuh terhadap wilayah tersebut

sebagai upaya untuk mengakhiri sengketa tersebut secara paksa yang sekaligus menandai dimulainya Perang Eritrea-Ethiopia (Plaut, 2017) Perang yang berlangsung selama 2 tahun tersebut diperkirakan membunuh setidaknya 80.000 orang, melukai ribuan orang lainnya dan menghabiskan setidaknya 6 miliar dollar bagi pembangunan militer secara masif yang berujung dengan hancurnya potensi pembangunan ekonomi jangka panjang bagi 110 juta penduduk di kawasan tersebut (Batarfi, 2018). Kehancuran jangka panjang yang disebabkan oleh konflik tersebut dibandingkan dengan hasil yang diraih oleh Mengisteab (1999) disebut sebagai *senseless war* diantara dua orang botak yang memperebutkan sisir.

Konflik tersebut dalam perkembangannya menunjukkan kecenderungan *stalemate* atau pada dasarnya buntu tanpa ada kemajuan yang signifikan. Hal ini semakin diperparah dengan adanya tekanan dari komunitas internasional seperti Uni Afrika dan PBB yang mengancam akan memberikan sanksi, pada akhirnya memaksa kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata dan lebih menekankan dialog maupun negosiasi demi mengakhiri konflik. Negosiasi dan dialog tersebut berujung dengan disetujuinya perjanjian Aljirs pada tahun 2000 di Aljazair yang secara resmi mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung dua tahun tersebut. Dalam perjanjian Aljirs, kedua negara setuju untuk menghentikan konflik bersenjata dan membentuk garis demarkasi sepanjang 25 kilometer yang dijaga oleh UNMEE atau *United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea*. Dalam perjanjian tersebut pula kedua negara juga memutuskan untuk menyerahkan upaya penyelesaian sengketa wilayah perbatasan diantara keduanya melalui pembentukan dua komite yang dibentuk oleh PBB yaitu Komite Klaim dan

Komite Perbatasan (Lyons, 2009). Kedua komite tersebut diisi oleh perwakilan negara-negara netral yang ditunjuk oleh PBB, bertugas untuk mempelajari isu-isu klaim wilayah tersebut berdasarkan pada bukti-bukti historis yang ada seperti perjanjian kolonial, perubahan geografis selama beberapa dekade terakhir hingga negara mana yang cenderung membangun kawasan tersebut selama ini. Menurut Lacey (2002) hasil yang dimunculkan oleh kedua komite pada dasarnya menunjukkan $\frac{3}{4}$ wilayah bahwa Badme dan kawasan sekitarnya merupakan wilayah Eritrea meskipun tidak secara eksplisit disebutkan di dalam laporannya. Hasil tersebut cenderung tidak menyenangkan Ethiopia yang meraih jauh lebih sedikit dari wilayah yang secara *de facto* berada di bawah kontrol mereka ditambah lagi wilayah sengketa lain seperti Tsorona juga harus diserahkan kepada Eritrea berdasarkan pada temuan komisi tersebut. Sementara itu di Eritrea sendiri perjanjian tersebut memunculkan dinamika baru yang disebabkan oleh ditemukannya fakta bahwa wilayah Zalambessa dan Bure yang berada dibawah kontrol Eritrea harus diserahkan kepada Ethiopia jika dilihat dari temuan yang ada (Lacey, 2002).

Temuan tersebut memunculkan isu internal mengingat besarnya harga yang harus dibayar oleh masyarakat kedua negara dalam memperebutkan kawasan-kawasan yang dipersengketakan tersebut. Di Ethiopia sendiri, rezim Meles Zenawi yang telah berkuasa semenjak kejatuhan rezim komunis DERG pada 1991 dan di dukung baik oleh faksi militer maupun mayoritas dari *Tigray People's Liberation Front* atau TPLF, yang berasal dari kaum minoritas Tigray yang menguasai partai koalisi tunggal pemerintahan yaitu *Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front* atau EPRDF, menjawab keresahan tersebut dengan menolak upaya implementasi terhadap garis perbatasan yang baru oleh

pasukan UNMEE dan dilanjutkannya pendudukan terhadap kawasan Badme dan sekitarnya oleh militer Ethiopia dengan harapan bahwa Ethiopia dapat menegosiasikan ulang hasil dari perjanjian tersebut (Gray, 2006). Penolakan yang terus berlanjut hingga batas waktu penyerahan wilayah-wilayah tersebut pada akhir 2007 tersebut dapat dilihat sebagai suatu respon dan upaya pertanggung jawaban tidak hanya terhadap masyarakat Ethiopia namun juga kepada faksi militer yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil di meja perundingan dengan hasil di lapangan yang sesungguhnya menunjukkan keunggulan bagi Ethiopia (McLure, 2007). Meskipun melanggar suatu perjanjian internasional, momentum konflik tersebut yang bertepatan dengan serangan 11 September, membuat Amerika Serikat dan negara-negara Barat cenderung bersikap lunak terhadap Ethiopia yang merupakan sekutu potensial di kawasan tersebut. Terlebih lagi Eritrea di bawah rezim Afwerki menunjukkan sikap yang berlawanan dengan kebijakan negara-negara Barat baik terhadap isu kemanusiaan, demokrasi maupun kebijakan anti-terror Barat sehingga seringkali diposisikan sebagai *rogue nation* oleh komunitas internasional (Plaut, 2017). Kondisi ini tidak dipungkiri menyebabkan berbagai upaya mediasi lanjutan baik yang dilakukan oleh organisasi multilateral maupun negara seperti Amerika Serikat maupun negara-negara Teluk yang bertetangga dengan negara di kawasan Tanduk Afrika tersebut cenderung mengalami kebuntuan dan tidak membuahkan hasil yang signifikan.

Tensi diantara kedua negara dalam perkembangannya juga menunjukkan eskalasi antara periode 2006 hingga 2010 seiring adanya peningkatan konflik tersebut dari sekedar sengketa perbatasan menjadi suatu konflik hegemoni diantara kedua negara yang

ditunjukkan oleh munculnya *proxy war* di kawasan tersebut seperti yang terjadi dalam konflik di Somalia pada 2006-2009. Dalam konflik tersebut Ethiopia berhasil menggulingkan Pemerintahan Islam Somalia yang di dukung oleh Eritrea dan menggantinya dengan pemerintah federal yang pro terhadap Ethiopia dan negara-negara Barat (Plaut, 2017). Dalam perkembangannya konflik diantara kedua negara di Somalia tersebut secara tidak langsung memunculkan pula gerakan teroris paling berbahaya di kawasan Afrika Timur yaitu Al-Shabaab yang dipercayai didukung dan disponsori secara tidak langsung oleh pemerintah Eritrea.

Paska kematian Zenawi pada 2012, janji penyelesaian sengketa dan upaya normalisasi hubungan dengan Eritrea tetap diusung oleh penerusnya yaitu Hailemariam Desalegn. Namun naik-turunnya hubungan diplomatik antara Ethiopia dengan Eritrea selama satu dekade dan kurangnya dukungan bagi rezim Desalegn baik di dalam perpolitikan maupun ditengah masyarakat Ethiopia sendiri mempersulit upaya rezim Desalegn dalam mencari justifikasi untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan diantara kedua negara. Hal ini didukung pula oleh adanya perubahan sudut pandang diantara masyarakat di kedua negara khususnya Ethiopia yang paska berakhirnya konfrontasi langsung memandang konflik dengan Eritrea tidak lagi hanya sebatas konflik perbatasan namun juga sebagai upaya dalam mempertahankan prestise dari masing-masing negara (Abbay, 2001). Faktor-faktor ini tidak dipungkiri membuat upaya penyelesaian sengketa di era Desalegn sekali lagi mengalami kebuntuan. Bahkan di era Desalegn, pemerintah Ethiopia semakin mengisolasi Eritrea dari berbagai pentas internasional yang semakin memperkecil kemungkinan damai bagi kedua negara.

Ketidakmampuan Desalegn dalam menyelesaikan sengketa dengan Eritrea mengganggu upaya Ethiopia dalam meningkatkan tingkat kestabilan di kawasan Tanduk Afrika selama periode kekuasaannya. Hal ini tidak dipungkiri berdampak besar pada upaya reformasi politik dan ekonomi yang dilakukannya dalam mengdongkrak perkembangan negara *landlocked* seperti Ethiopia. Kekeringan panjang yang melanda Ethiopia dan kelaparan yang mengikuti menjadi kulminasi dari munculnya krisis politik semenjak tahun 2015 (Kestler-D'Amours, 2018). Krisis politik yang tidak menemui penyelesaian selama beberapa tahun dan berujung pada korban jiwa dalam jumlah ratusan tersebut berkembang semakin parah dan memperlemah faksi TPLF dan militer yang selama ini menguasai pemerintahan. Dalam prosesnya hal ini pada akhirnya memaksa mundur Hailemariam Desalegn pada awal 2018 dan menyerahkan dominasi pemerintahan pada partai *Oromo Democratic Party* atau ODP yang selama periode krisis tersebut memimpin gerakan oposisi terhadap dominasi TPLF di dalam koalisi EPRDF (Kestler-D'Amours, 2018).

Kejatuhan Desalegn dan melemahnya TPLF, berujung pada ditunjuknya Wakil Presiden dari kawasan Oromia yaitu Abiy Ahmed oleh ODP untuk menjadi penggantinya di tahun yang sama (Mokkadem, 2019). Semenjak berkuasa pada 2 April 2018, Abiy Ahmed yang mencoba memperbaharui upaya reformasi perpolitikan dan perekonomian Ethiopia dalam mengakhiri krisis politik yang ada, menjanjikan kepada masyarakat bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Eritrea dan Ethiopia menjadi salah satu agenda utama dalam kebijakan luar negerinya yang harus dipenuhi dan diselesaikan secepatnya agar dapat pula mendukung upayanya untuk menstabilkan kawasan tersebut.

Hal ini terbukti bahwa tidak lama paska mendapatkan lampu hijau dari komite eksekutif EPRDF pada 5 Juni 2018 yang menandai penerimaan hasil dari komite klaim dan perbatasan sekaligus pengimplementasian perbatasan baru, Abiy Ahmed segera meluncur ke Asmara, ibukota Eritrea untuk meminta konfirmasi dari rezim Isaias Afwerki. Kunjungan tersebut dalam prosesnya memunculkan *joint declaration of peace and friendship* pada 9 July 2018 yang secara resmi diratifikasi dengan bantuan dan mediasi lanjutan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di Jeddah pada September 2018 dan memunculkan *Jeddah Peace Agreement* (Arab News, 2018). Perjanjian tersebut menekankan komitmen Ethiopia untuk mengimplementasikan hasil dari perjanjian Aljirs yang hampir selama dua dekade tertunda khususnya terkait penyerahan wilayah Badme kepada Eritrea dan menandai dimulainya upaya normalisasi hubungan diantara Eritrea dan Ethiopia yang selama dua dekade telah terputus.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dilihat bahwa kedua negara tidak memiliki hubungan bilateral yang aktif dan positif selama hampir dua dekade terakhir yang memungkinkan suatu resolusi untuk tercapai secara umum ditambah secara *de facto* Ethiopia sendiri dapat dikategorikan sebagai hegemon di kawasan Tanduk Afrika baik secara geografis, kondisi ekonomi hingga kekuatan diplomatik yang lebih didengarkan oleh Amerika Serikat dan negara Barat jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan tersebut khususnya dalam isu ini yaitu Eritrea. Maka **faktor-faktor apa yang menjadi motif atau alasan**

pemerintah Ethiopia di bawah rezim Abiy Ahmed untuk merubah kebijakannya terhadap Eritrea?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Ethiopia yang selama dua dekade ini cenderung menekankan hubungan yang konfrontatif dengan Eritrea, namun di era kepemimpinan Perdana Menteri Abiy Ahmed cenderung menunjukkan sikap yang berlawanan dengan pendahulunya. Dalam penelitian ini akan ditelaah faktor – faktor atau alasan apa saja yang melatarbelakangi keputusan Ethiopia di bawah rezim Abiy Ahmed untuk mengubah sikap kebijakan luar negerinya dengan Eritrea.

1.4 Tinjauan Pustaka

Berakhirnya Perang Dingin pada 1991 dan mulai masuknya dunia ke era globalisasi tidak dipungkiri telah mengubah struktur dan tatanan dunia. Perubahan tersebut mendorong berbagai negara di dunia untuk menyesuaikan berbagai kebijakannya dengan tatanan baru yang ada. Ethiopia sendiri dalam perkembangannya tidak terlepas dari perubahan tersebut. Menurut Negera Gudeta Adula (2019) dalam tulisannya yaitu *Ethiopian Foreign Policy Under Military and EPRDF Regimes: Changes and Continuities*, Ethiopia paska rezim militer DERG memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda dengan pendahulunya. Di era rezim militer Hailemariam Mengistu kebijakan luar negeri Ethiopia sangat berorientasi pada paham Lenin-Marxist yang

berujung pada kedekatan Ethiopia terhadap Uni Soviet dibandingkan pada Amerika Serikat seperti yang dilakukan di masa kekaisaran. Selain itu rezim militer cenderung mendefinisikan berbagai hal eksternal sebagai suatu ancaman bagi kepentingan nasional yang berujung pada pembangunan kapabilitas militer sebagai suatu prioritas nasional yang harus ditekankan, bahkan jika perlu mengorbankan berbagai aspek kesejahteraan sosial masyarakat dan pada akhirnya memunculkan banyak permasalahan sosial baik dari segi keterbelakangan ekonomi, kemiskinan dan puncaknya adalah kekeringan dan kelaparan masal pada dekade 80an. Kondisi inilah yang menurut Adula (2019) coba diubah oleh rezim baru EPRDF paska jatuhnya rezim militer DERG dan berpisahnya Eritrea pada 1991. EPRDF cenderung melakukan reorientasi kepentingan nasional Ethiopia dari sebelumnya berorientasi keluar menjadi cenderung kedalam. Rezim EPRDF mengkategorikan keterbelakangan ekonomi dan kemiskinan sebagai dua ancaman utama bagi perkembangan Ethiopia kedepannya. Hal inilah yang pada akhirnya menjadikan berbagai perkembangan kebijakan yang muncul di Ethiopia paska rezim militer, baik yang mengarah kedalam maupun keluar cenderung mereflesikan sekali upaya Ethiopia untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Lebih lanjut menurut Alexandra Magnolia Diaz (2008) dalam tulisannya yang berjudul "*An Inter-state War in the Post-Cold War Era: Eritrea-Ethiopia*", perkembangan kebijakan luar negeri Ethiopia tersebut cenderung menimbulkan persaingan khususnya dengan Eritrea yang sebaliknya ingin keluar dari ketergantungannya terhadap Ethiopia. Hal ini tidak dipungkiri menjadi salah satu faktor utama dari beberapa faktor selain politik dan isu wilayah yang memantik pecahnya perang

diantara Eritrea dan Ethiopia pada 1998. Paska berakhirnya konflik terbuka dengan Eritrea pada 2002, Ethiopia yang masih mempertahankan status perang dengan Eritrea cenderung mengubah kebijakannya untuk juga memprioritaskan perkembangan dan stabilisasi kawasan sebagai upaya mengamankan kepentingan nasionalnya dan perannya sebagai hegemon kawasan. Hal ini dalam perkembangannya memancing konflik lanjutan dengan Eritrea di berbagai front dan berujung pada munculnya *proxy wars* di kawasan tersebut.

Menurut Melaku Mulualem (2014) dalam tulisannya "*Foreign policy convergence between Ethiopia and America*", semenjak berkuasa pada 1991, rezim EPRDF juga kembali membawa kebijakan luar neger Ethiopia ke akarnya yang condong pada kepentingan Barat khususnya Amerika Serikat yang di era kekaisaran telah memiliki hubungan erat. Hubungan ini pun semakin erat paska perang diantara Eritrea dan Ethiopia pada 2002 yang bertepatan dengan dimulainya *Global War on Terror* yang dicanangkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat melihat Ethiopia sebagai partner strategis bagi kepentingannya di kawasan dan sebaliknya Ethiopia ingin mendapatkan keuntungan khususnya dari segi ekonomi dari kehadiran Amerika Serikat. Eratnya hubungan ini dapat terlihat dengan betapa mudahnya Ethiopia dalam melobby Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi dan embargo bagi Eritrea pada 2009 yang dituduh mendanai aksi terorisme di kawasan bersama kelompok terro Al-Shabaab.

Dari berbagai tulisan tersebut penulis melihat bahwa perubahan kebijakan luar negeri Ethiopia pada 2018 menunjukkan adanya perubahan baru tidak hanya bagi perkembangan Ethiopia sendiri namun juga kawasan. Penulis dalam hal ini berupaya menyajikan sebuah tulisan terhadap upaya reorientasi kebijakan yang dilakukan oleh

suatu rezim baru dari kebijakan yang diambil oleh pendahulunya. Penulis mengakui bahwa terbatasnya bahan bacaan menjadi salah satu hambatan maupun juga peluang yang mendasari penelitian penulis ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 *Foreign Policy Decision Making*

Dalam menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Ethiopia di bawah rezim Abiy Ahmed khususnya dengan Eritrea, maka harus dipahami bahwa proses tersebut tidak terlepas dari pengambilan keputusan atau *decision making* di dalam pemerintahan atau rezim yang bersangkutan. *Decision making* atau dalam kasus ini adalah *foreign policy decision making* dapat diartikan sebagai refleksi dari pemenuhan kepentingan atau agenda nasional suatu negara dalam konteks perpolitikan internasional. Kepentingan nasional yang ingin dituju sendiri bersifat elastis karena kepentingan nasional dapat berubah menyesuaikan kondisi dan dinamika negara tersebut dan tergantung pada rezim yang berkuasa (Rochester, 1978). Kepentingan nasional dijadikan sebagai dasar dalam membuat hingga merubah suatu kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri di suatu negara. Bagi negara itu sendiri kepentingan nasional menentukan kemana arah negara tersebut bergerak baik dari segi pemerintahannya maupun masyarakatnya. Sementara jika kepentingan nasional suatu negara itu ditunjukkan kepada negara lain, maka negara itu dapat juga mempengaruhi negara lain dalam menentukan kebijakannya tergantung seberapa besar pengaruh negara tersebut kepada negara lain. Hal ini pada dasarnya

dilakukan demi memenuhi kepentingan mereka sendiri sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan nasional itu bersifat individualis (Clinton, 1986).

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional (Plano & Olton, 1999). Sedangkan perubahan kebijakan luar negeri sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perubahan sikap suatu negara dalam usaha untuk mencapai kepentingannya yang dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor eksternal dan internal dari sebuah negara. Dengan kata lain, perubahan kebijakan luar negeri terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya.

1.5.2 External-Internal Setting Theory

Untuk memahami bagaimana suatu pembuatan keputusan atau kebijakan dilakukan khususnya oleh suatu negara, penulis menekankan model pembuatan keputusan menurut Richard Snyder (1962) yaitu *External-Internal Setting Theory* yang bahwasannya perilaku politik luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor atau dalam hal ini disebut sebagai *setting* eksternal dan internal yang menyelimuti dinamika suatu negara. *Setting* eksternal dalam hal ini dapat meliputi faktor-faktor yang berbeda diluar batas – batas yang ada di suatu negara, seperti aksi dan reaksi dari negara lain, lingkungan non-manusia hingga budaya-budaya dari masyarakat lainnya diluar teritori

suatu negara. Sementara itu *setting* internal dapat meliputi kondisi masyarakat dalam suatu negara, lingkungan manusia seperti aspek populasi dan budaya dalam negara tersebut hingga dinamika dari faktor non-manusia. *External* dan *internal setting* memiliki posisi yang sama dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam pembuatan keputusan politik luar negeri dan para pembuat kebijakan berusaha menyeimbangkan faktor tersebut dalam perumusan politik luar negeri.

Kelebihan dari model Snyder yaitu dinamika manusia dianggap lebih efektif dari politik luar negeri itu sendiri. Maka dari itu, faktor-faktor yang paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan dalam kebijakan perpolitikan luar negeri suatu negara menurut Richard Snyder adalah:

1. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma yang dianut), merupakan suatu dorongan untuk menggunakan kesempatan yang dimiliki dan menekankan mengapa suatu keputusan tersebut diambil.
2. Arus informasi diantara mereka (jaringan informasi), untuk mengetahui sumber-sumber yang dapat menjadi masukan bagi perumusan politik dan kebijakan luar negeri.
3. Pengaruh dari berbagai dinamika dalam perpolitikan luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri, menekankan tentang persepsi mengenai lingkungan internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut.

4. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam krisis atau tidak dalam krisis suatu keputusan tersebut diambil. Maka banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi suatu aktor.

Kerangka variabel yang dimaksud adalah lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang melekat pada aktor, termasuk juga struktur sosial dan perilaku. Sehingga, berdasarkan pada teori yang dikembangkan oleh Richard Snyder bahwasannya dapat diaplikasikan kepada suatu proses pembuatan politik luar negeri dalam kasus ini yaitu Ethiopia terhadap Eritrea. Dari penjelasan tersebut maka eksternal setting dalam tulisan ini dapat direpresentasikan berdasarkan pada situasi dan kondisi maupun upaya dari luar teritori suatu negara yang dalam kasus ini yaitu Ethiopia. Upaya dari luar tersebut dapat berupa desakan, intervensi maupun upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam menengahi sengketa antara Ethiopia dan Eritrea maupun adanya perkembangan dari luar yang mempengaruhi perkembangan di dalam negeri itu sendiri. Sementara internal setting dalam tulisan ini direpresentasikan baik dari motivasi rezim atau pemimpin yang berkuasa maupun situasi atau perkembangan yang berlangsung saat pengambilan keputusan atau kebijakan tersebut dilakukan.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah serta pokok permasalahan yang telah dikemukakan penulis di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sementara bahwasannya terdapat faktor – faktor internal dan eksternal yang memotivasi perubahan kebijakan

Ethiopia di bawah rezim Abiy Ahmed. Faktor Internal tersebut dapat direpresentasikan baik dari motivasi rezim atau pemimpin yang berkuasa maupun situasi atau perkembangan yang berlangsung saat pengambilan keputusan atau kebijakan tersebut dilakukan hingga kondisi-kondisi yang tidak dapat berubah dari negara tersebut seperti geografis. Sementara faktor eksternal dalam tulisan ini dapat direpresentasikan berdasarkan pada situasi dan kondisi maupun upaya dari luar suatu negara yang dalam kasus ini yaitu Ethiopia. Upaya dari luar tersebut dapat berupa desakan, intervensi maupun upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam menengahi sengketa antara Ethiopia dan Eritrea maupun adanya perkembangan dari luar yang mempengaruhi perkembangan di dalam negeri itu sendiri.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual & Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1 Kebijakan Luar Negeri

Menurut James E. Anderson (1984) konsep kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian aksi atau tindakan yang ditujukan dengan maksud tertentu dan dilaksanakan baik oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu isu atau permasalahan. Kebijakan luar negeri sendiri menurut Rosenau (1969) dapat diartikan sebagai tindakan otoritas yang dilakukan pemerintah guna mempertahankan kepentingan yang dimiliki oleh negara tersebut dalam cakupan internasional. Kebijakan luar negeri dapat dikatakan sebagai salah satu komponen krusial dalam mengantarkan suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam konteks tersebut maka suatu kebijakan

luar negeri dapat dikatakan merupakan media bagi suatu negara dalam berkomunikasi dengan negara lain di berbagai bidang yang menguntungkan baik ekonomi, sosial-budaya hingga keamanan. Sehingga dalam penelitian ini perubahan kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai tindakan dari pemerintah atau rezim yang berkuasa dalam memenuhi kepentingan nasional yang ingin dicapai dengan mengubah atau reorientasi sikap maupun pandangan mereka terhadap suatu isu yang ada dalam lingkup internasional

1.7.1.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar wilayah lingkungan kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Richard Synder (1962) faktor eksternal lebih menekankan struktur internasional seperti hubungan dengan negara lain serta situasi dunia. Perubahan eksternal yang cenderung tidak terprediksi memerlukan antisipasi dan adaptasi yang lebih responsif. Faktor eksternal dalam hal ini menghubungkan tentang hubungan antara negara-negara dalam sistem internasional dan negara sebagai aktor utama dalam proses pembuat keputusan. Sebuah negara harus sigap dalam menghadapi kondisi di luar domestiknya, sebab keterlambatan dalam adaptasi terhadap lingkungan luar dapat berakibat fatal dan mampu menghambat pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Faktor eksternal sendiri dapat berupa aksi maupun reaksi dari negara lain, serta adanya campur tangan atau intervensi dari organisasi internasional dan regional.

1.7.1.3 Faktor Internal

Faktor internal dalam tulisan ini adalah faktor bersumber dari dalam negara atau masyarakat itu sendiri yang mempengaruhi para pembuat kebijakan atau *decision makers*. Menurut Amer Rizwan (2009) faktor internal dalam penentuan kebijakan luar negeri dapat di dasarkan pada faktor geografis, budaya dan keterkaitan sejarah, faktor ekonomi, teknologi, kapabilitas nasional, struktur sosial, opini publik, kondisi perpolitikan, akuntabilitas politik, kondisi press, birokrasi yang bekerja, ideologi maupun faktor psikologis dari rezim yang berkuasa. Penulis melihat bahwa baik kondisi geografis Ethiopia yang *landlocked*, kondisi perekonomian yang stagnan maupun kondisi perpolitikan dan peran ataupun motivasi dari rezim yang berkuasa menjadi salah satu faktor internal yang menentukan dalam penelitian ini.

1.7.2 Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terbatas dari sudut pandang Ethiopia sebagai subjek penelitian dan meliputi berbagai perkembangan yang memotivasi perubahan kebijakan Ethiopia di bawah rezim Abiy Ahmed terhadap Eritrea setelah selama dua dekade terakhir memiliki hubungan yang naik turun. Jangkauan penelitian diambil antara 1991-2018. Tahun 1991 dipilih oleh peneliti melihat bahwa pada tahun tersebut bertepatan dengan kemerdekaan Eritrea dan sekaligus mengawali klaim dan sengketa panjang yang berujung dengan perang berskala penuh diantara Ethiopia – Eritrea pada 1998 – 2000 dan mengawali periode “perang dingin” selama dua dekade. Sementara tahun 2018 dipilih melihat bahwa pada tahun tersebut terjadi perubahan rezim di Ethiopia

dengan diangkatnya Abiy Ahmed sebagai perdana menteri baru Ethiopia. Di tahun yang sama rezim baru Abiy Ahmed memutuskan untuk mengikuti dan mematuhi hasil dari kedua komite yang selama hampir dua dekade terakhir ditolak dan berjanji untuk menyerahkan wilayah Badme terhadap Eritrea. Tahun tersebut juga bertepatan dengan dimulainya normalisasi hubungan diantara kedua negara. Selain itu hal ini di dasarkan pula pada tipe penelitian penulis yang menekankan pada analisis perkembangan sehingga harus mampu menjangkau hingga tahun terakhir. Penelitian ini masih terbuka bagi penyajian data sebelum 1991, melihat pentingnya mendapatkan overview terkait situasi dan kondisi sebelum kemerdekaan Eritrea dan perubahan rezim di Ethiopia dapat menjadi salah satu faktor penunjang penelitian ini.

1.7.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengikuti model eksplanatif dengan mengkaji catatan sejarah dan peristiwa dalam periode tersebut mengenai aktivitas dan hubungan diantara kedua negara. Hal ini dilakukan dalam menunjukkan kondisi yang memotivasi rezim Abiy Ahmed dalam mengubah orientasi kebijakan Ethiopia terhadap Eritrea. Model penjelasan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat yang berujung pada perubahan sikap dan orientasi ulang terhadap kebijakan yang ada.

1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari sumber kualitatif primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari rekaman langsung atau pernyataan formal

dari individu yang relevan. Data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumber utama dari mana informasi tersebut berasal namun dikumpulkan dari jurnal dan artikel ilmiah, laporan berita, ringkasan kebijakan, dan publikasi online atau cetak dari organisasi dan institusi terkait.

1.7.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan adalah analisis data kualitatif. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data sekunder secara interpretatif. Ini dilakukan melalui analisis konten untuk menganalisis data primer yang dikumpulkan dari rekaman video dan tweet pembuat kebijakan terkait, pernyataan resmi dalam laporan konferensi, dan data sekunder yang dikumpulkan dari jurnal akademik, dokumen, artikel berita cetak dan online, situs web organisasi terkait dan lembaga, dan ringkasan kebijakan. Dari analisis interpretasi tersebut kemudian dapat disusun hasil penelitian.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I sendiri terdiri dari pendahuluan dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis sementara maupun metodologi yang ditekankan oleh peneliti. Pada Bab II penulis berfokus pada pemaparan terhadap garis besar hubungan Eritrea dan Ethiopia sebelum konflik khususnya pada periode kolonialisme Eropa yang dipercaya menjadi akar bagi konflik diantara kedua negara pada saat ini hingga menelusuri

periode hubungan kedua negara paska kemerdekaan Eritrea dan digulingkannya rezim DERG di Ethiopia pada 1993 khususnya pada faktor-faktor seputar periode tersebut yang berkontribusi dalam mendorong kedua negara untuk meningkatkan eskalasi konflik dari konflik perbatasan menjadi perang berskala penuh pada 1998. Bab III penulis berfokus pada data-data pendukung penelitian yang menjelaskan situasi dan kondisi internal dari Ethiopia yang mencakup geografis, politik, ekonomi maupun situasi demografi. Bab ini juga akan menjelaskan garis besar hubungan luar negeri Ethiopia dan peran mereka dalam pentas internasional khususnya selama dua dekade terakhir. Sementara pada Bab IV penulis menekankan pada penjabaran analisa penulis terhadap variabel internal maupun eksternal yang menjadi motif dibalik perubahan kebijakan Ethiopia terhadap Eritrea di bawah rezim Abiy Ahmed. Sementara bab V berisi hasil pengujian hipotesis penulis yang ditutup dengan kesimpulan.